

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, 2011, Hukum Kehutanan Di Indonesia, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Adrian Sutedi, 2011, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika.
- Agus Salim Andi Gadjong, 2007, Pemerintahan Daerah (Kajian Politik dan hukum), Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ahmad Nashih, 2015, Asas-asas Keagrariaan Indonesia, Yogyakarta: STPN Press.
- Bambang Waluyo, 1999, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika.
- Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 2009, Eksekutif Data Strategis Kehutanan 2009, Jakarta : Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
- Eny Kusnardi, 2010, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Yogyakarta : UNY Pers.
- Gatot Supramono, 2012, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Helmi, 2012, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nandang Sudrajat, 2010, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Nur Basuki Winarno, 2008, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta : Laksbang Mediatama.
- Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya : Yuridika.
- _____, dkk, 2015, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta : Gadjah Mada University Pers.
- Ridwan HR, 2013, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Rajawali Pers.
- Salim H.S, 2008, Dasar-dasar Hukum Kehutanan, Jakarta : Sinar Grafika.

_____, 2007, Hukum Pertambangan Di Indonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Pers.

Y Sri Pudyatmoko, 2009, Perizinan: Problem dan Upaya Pembinaan, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah

Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan atas perubahan Permen KLHK Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016

Kepmen ESDM Nomor 1095 K/30/MEM/2014 sebagaimana telah dirubah dengan Kepmen 3669 K/30/MEM/2017 Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera

Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796 /K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Serta Penerbitan Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Keputusan Menteri ESDM Nomor 1798 /K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara sebagai mana telah dirubah menjadi Kepmen ESDM Nomor 24 /K/30/MEM/2019

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Budi Riyanto, “Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan dan Kegiatan Pertambangan”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 5 No. 3.

Dimas Saputra Rusmin, Implikasi Yuridis Dalam Pengelolaan Panas Bumi Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi: Studi Kasus Nota Kesepahaman Antara Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan Terkait Sembilan Wilayah Kerja Panas Bumi Di Kawasan Hutan Konservasi, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012.

D. Internet

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/hutan>, 21 Januari 2019

<https://mongabay.co.id/2016/12/31/rapor-merah-tata-kelola-lahan-dan-kekayaan-alam-sumbar> diakses pada tanggal 09 September 2017

<http://mentawai kita.com/berita/504/menata-kembali-izin-tambang-di-sumbar> di akses pada tanggal 10 September 2017

<http://sains.kompas.com/read/2017/08/16/160800423/perusahaan-nakal-berpotensi-hilangkan-20.000-hektar-hutan-sumbar> di akses pada tanggal 10 September 2017

<https://www.bappenas.go.id>> ... DOC

<https://www.bps.go.id/statictable/2013/12/31/1716/luas-kawasan-hutan-dan-kawasan-konservasi-perairan-indonesia-menurut-provinsi-berdasarkan-sk-menteri-kehutanan.html>

<https://www.dishut.sumbarprov.go.id/details/pages/4>

https://www.sipsakato.sumbarprov.go.id/main/jenis_perizinan

E. Lain-Lain

Laporan Perhitungan Laju Deforestasi Indonesia Periode 2006-2009 Oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2017 (LKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

